

KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA MEDAN

M. Umar Maya Putra

Entrepreneurship Development Program
umar_yazli@yahoo.com

Abstract

By 2012 the population of Medan has applied the concept of community empowerment. National Program for Community Empowerment (PNPM) adapted from the central government into a program that is often done to improve community empowerment. Other programs also do is increase the entrepreneurial base that always emphasized with some assistance such as Credit (KUR) and Revolving Fund Program (GDP) to drive the real sector which is the base that reaches directly to the public. But in a dilemma, Medan is still recorded a maximum point in the development of industry. If ordered three of the Central Bureau of Statistics in 2012, the Regional North Sumatra contributor who has contributed in the industry sector is 1. Deli Serdang amounted to 29.95%, 2 Medan of 18, 20%, and the 3. Batu Bara for 13.75%. From the data collected, of course, required an increase of the industrial sector to accelerate a multiplier effect on revenue (PAD) and empower a more populist economic base can be carried out and the public is able by itself to have independence and can develop an invention and innovation of a concept superior product as a brand in Medan.

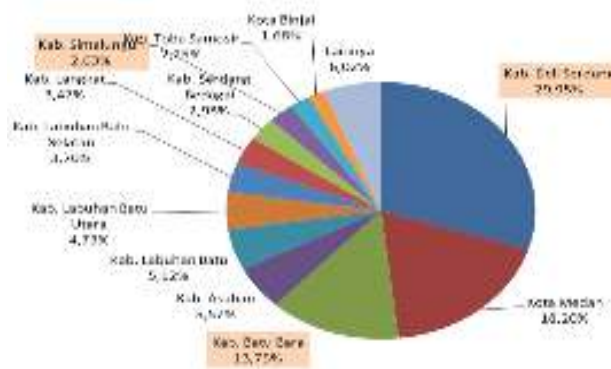
Keywords: *community development, public policy, entrepreneurship*

1. Pendahuluan

Kota Medan sebagai barometer perkembangan perekonomian di Sumatera Utara, merupakan suatu wilayah yang dapat dijadikan suatu basis perkembangan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dapat dipandang melalui tiga aspek yang utama yaitu konsep pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik dan perkembangan konsep kewirausahaan. Sinergi dari ketiga hal tersebut dapat meningkatkan suatu kinerja perekonomian serta dapat mampu menjadikan masyarakat menjadi suatu subyek dalam pembangunan sehingga tidak adanya ketergantungan dengan pemerintah dan dapat mengembangkan potensi yang terdapat di Sumatera Utara.

Tahun 2015, Masyarakat Kota Medan akan menghadapi suatu tahun yang berat yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana akan menjadi suatu tantangan besar bagi Kota Medan yang sangat dekat dengan negara seperti Malaysia, Singapura yang akan mengambil kesempatan yang berada di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Jika melihat perkembangan pusat industri di Sumatera Utara, Kota Medan berkontribusi sebesar 18,20% untuk perindustrian Sumatera Utara dimana menduduki peringkat kedua diatas Deli Serdang sebesar 29,95% dan untuk peringkat ketiga ditempati oleh Kabupaten Batu Bara sebesar 13,75%. Hal ini merupakan tantangan bagi Kota Medan untuk meningkatkan basis industri untuk bisa menghasilkan masyarakat yang mandiri dan bermindset *out of the box* yaitu bisa melakukan pemberdayaan untuk memanfaatkan fasilitas yang terkandung di Kota Medan yang tentunya diperlukan pembinaan oleh pemerintah melalui kebijakan publik serta adanya

keberanian untuk mengelola usaha melalui konsep kewirausahaan dengan konsep kelembagaan agar terciptanya usaha yang berdaya saing global untuk menghadapi persaingan di MEA 2015.



Gambar 1 Pusat Industri (Sumber BPS)

2. Kajian Pustaka

2.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya, Makna yang lebih luas dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem Sistem Ekonomi Pancasila [1].

Ekonomi rakyat adalah kancan kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, wong cilik, yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Dalam literatur ekonomi pembangunan ia biasa disebut sebagai sektor informal “*Under Ground Economy*” atau “*Extralegal Sector*”. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata [1].

Dengan demikian melalui basis ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh rakyat terkadang ada yang memiliki badan hukum dan lebih banyak yang tidak memiliki badan hukum, namun dilihat dari ketahanan ekonomi kerakyatan diterpa krisis multi dimensi tahun 1997, dimana sistem keuangan mengalami *collapse* dan usaha besar mengalami kebangkrutan, Usaha kecil yang merupakan basis dari ekonomi kerakyatan tetap bisa bertahan dan memberikan kontribusi positif. Hal ini merupakan suatu potret dalam pemberdayaan masyarakat bahwa ekonomi kerakyatan harus menjadi titik utama dalam kebijakan pemerintah untuk menciptakan konsep kreatif dan inovatif.

Underground Economy ini sering juga disebut sebagai *shadow economy*, ekonomi informal, *parallel economy*, atau juga *hidden economy*. Oleh karena ada aktivitas yang ilegal, *Underground Economy*, atau juga sering dikenal juga dengan sebutan *black economy*. Hal ini sejalan juga dengan defenisi yang sering digunakan Scheider dan Enste yitu bahwa *shadow economy* mencakup bukan hanya aktivitas-aktivitas yang legal, akan tetapi juga berbagai bentuk pendapatan/penerimaan yang tidak tercatat, dimana berasal dari produksi barang-barang dan jasa-jasa, baik transaksinya menggunakan alat pembayaran (tunai/uang (unit moneter) ataupun hanya dengan cara barter/pertukaran [10]. Dengan kata lain, *Underground Economy* sebetulnya mencakup semua aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak/retribusi bila aktivitas-

aktivitas tersebut tercatat di otoritas pajak/retribusi. Oleh sebab itu diyakini bahwa semakin besar *Underground Economy*, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak/retribusi yang hilang.

Terkadang usaha kecil yang bisa masuk ke dalam *excess* mengakibatkan *black economy* dikarenakan kurangnya masyarakat berperan sebagai subjek dalam pembangunan dan terasa untuk masyarakat yang berada dalam usaha kecil masih belum berada pada taraf kesejahteraan sehingga sangat sulit untuk mengembangkan kemampuan dan aktivitas untuk menciptakan suatu kreatifitas dan inovasi. Peran pemerintah sangat *vital* untuk meletakkan kembali fungsi dari kebijakan publiknya agar mampu membantu masyarakat untuk tidak terjebak dengan *black economy* serta mampu memaksimalkan potensi pemasukan dari pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Partisipasi bukan hanya sekedar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu dalam pengertian tersebut terkandung tiga pokok bahasan pokok yaitu: *mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberi sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab). mengatakan pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan [4].

2.2. Kebijakan Publik dalam Masyarakat

Dalam peningkatan pemberdayaan sebagai esensi dari ekonomi kerakyatan diperlukan partisipasi pemerintah selaku otoritas dalam kebijakan publik. hakikat kebijakan suatu kebijakan negara sebagai tindakan yang mengarah pada suatu tujuan, akan dapat dipahami dengan baik dengan memperinci ke dalam lima kategori, dikutip dari Hogwood dan Gunn dalam Rakhmat (2009-130) sebagai berikut [6] :

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)
Di dalam sistem politik, proses formulasi suatu kebijakan negara, merupakan berbagai desakan atau tuntutan dari para aktor pemerintah maupun swasta kepada pejabat pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu.
2. Keputusan kebijakan (*policy decision*)
Merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah, dengan maksud untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statement*)
Merupakan pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan negara tertentu. Apabila dicermati secara mendalam, pernyataan kebijakan dari seorang pejabat lainnya, sering bertentangan satu dengan lainnya.
4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)
Merupakan wujud kebijakan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang nyata yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan pernyataan kebijakan negara.
5. Hasil Akhir Kebijakan (*policy outcomes*)
Setelah suatu kebijakan selesai diimplementasikan terdapat hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) yaitu berapakah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan ataupun tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu.

Dalam hakikatnya pemerintah, harus meletakkan esensi dari kebijakan yang ditetapkan untuk bisa mengarah kepada kesejahteraan dan menghasilkan dari akhir kebijakan suatu masukan yang sangat berguna bagi masyarakat agar menghindari *excess* yang terjadi pada masyarakat yang merupakan dampak negatif dari perekonomian seperti *black economy*. Dengan adanya fungsi kebijakn publik dari pemerintah ini, akan membuat elemen masyarakat akan lebih mampu berdaya saing dan sangat yakin dalam menghadapi derasnya persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Bentuk keterlibatan pemerintah dalam perekonomian antara lain [2]:

1. Penarikan pajak, pajak merupakan iuran yang dipaksakan masyarakat/wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang berasal dari dalam negeri di luar utang luar negeri.
2. Pengeluaran pemerintah, merupakan belanja rutin negara meliputi: investasi pemerintah, konsumsi pemerintah dan pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang bersifat otonom.
3. Transfer Pemerintah (*Transfer Payment*) yaitu pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak mendapat balas jasa secara langsung. Misalnya pemberian beasiswa, dana pensiun, bantuan bencana alam, subsidi dan sebagainya.

Dari penarikan pajak pemerintah, tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diterima masyarakat dan seberapa besar masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jika pemberdayaan masyarakat ini, berperan secara aktif, maka segala hal terkait dengan pengeluaran pemerintah maupun transfer pemerintah dapat menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagai sumber utama dalam pembangunan dan mampu di dalam jangka panjang mencapai tujuan kesejahteraan.

2.3. Peranan Kewirausahaan dalam Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan *entrepreneur*, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaruan dalam perekonomian. Pembaruan-pembaruan yang dapat diciptakan oleh para pengusaha dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu: (i) memperkenalkan suatu barang baru, (ii) penggunaan cara baru dalam memproduksi barang, (iii) memperluas pasar sesuatu barang ke daerah-daerah baru, (iv) mengembangkan sumber bahan mentah baru, atau, (v) mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industry [9].

Peranan pengusaha yang sangat dominan inilah yang harus dikembangkan dan pemerintah dapat mengalokasikan *budget* yang relevan untuk sektor ini. Pengusaha akan menggerakkan sendi perekonomian mulai dari sektor hulu dan hilir dari semua kawasan dan mampu menghasilkan suatu aglomerasi yang menciptakan suatu hasil baik secara vertical maupun secara horizontal.

Aglomerasi menunjukkan situasi pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi di lokasi-lokasi tertentu. Dalam kaitannya, dengan perkembangan industri, aglomerasi industri memperlihatkan keadaan berkumpulnya berbagai kegiatan industri, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Aglomerasi vertikal menunjukkan industri-industri yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya di dalam proses produksi berkelanjutan, baik kaitan ke belakang maupun kaitan ke depan. Selanjutnya aglomerasi horizontal menunjukkan industri-industri yang berkumpul, tidak memiliki kaitan dalam proses produksi, atau bersifat independen satu dengan lainnya [11].

Produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa

tanpa diawali oleh proses produksi. Secara umum produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan utility (nilai) suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal/kerja, modal, tanah) dalam waktu tertentu. Dalam sistem ekonomi islam, definisi produksi tidak jauh berbeda dengan tersebut di atas. Akan tetapi, dalam sistem ini, ada beberapa nilai yang membuat sistem produksi sedikit berbeda, dimana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi, harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam artian, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus dalam kerangka halal. Karena itu, terkadang dalam sistem ekonomi Islam ada pembatasan produksi terhadap barang-barang mewah dan hukan merupakan kebutuhan pokok [7].

Pengusaha dalam hal ini yang masuk dalam proses produksi dan distribusi, akan menjalankan segala hal secara baik agar menghasilkan peningkatan utility (nilai) suatu benda. Produksi yang berasal dari amal/kerja, modal, tanah akan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Jika dikaitkan dengan Ekonomi Islam, segala sesuatu yang dilakukan oleh produsen harus disesuaikan dengan nilai syariah sehingga dalam proses produksi diperlukan suatu kehalalan dan kehiagenisan produk agar konsumen merasa nyaman jika berhubungan dengan bisnis kuliner dan tetap dapat dipertanggung jawabkan secara moral sebagai konsep ekonomi kerakyatan berbasis kewirausahaan.

Produsen harus memperhatikan dampak sosial (*social return*) sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Kendatipun proses produksi pada suatu lingkungan masyarakat dianggap mampu menanggulangi masalah sosial (pengangguran), namun harus memperhatikan dampak negatif dari proses produksi yang berimbas pada masyarakat dan lingkungan, seperti limbah produksi, pencemaran lingkungan, kebisingan, maupun gangguan lainnya [7].

Dengan demikian, secara ekonomi islam, Pengusaha dapat dikatakan sebagai solusi dalam pembangunan yang bisa memiliki suatu tanggung jawab moral dalam mengurangi pengangguran serta tetap memperhatikan dari kesehatan lingkungan agar tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang pengusaha dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam perekonomian untuk membantu pemerintah dalam hal kebijakan publik supaya bisa menjadi suatu pelaku yang dapat membantu dalam hal pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dengan terciptanya banyak pengusaha, akan meningkatkan suatu perkembangan ekonomi yang terintegrasi secara menyeluruh dan dapat menjadikan semua sektor dapat bergerak khususnya di segala lapisan permasalahan yang terjadi. Sebagai contoh: permasalahan pengangguran yang menjadi masalah utama dalam pembangunan akan dapat diselesaikan jika pengusaha mampu banyak menyerap tenaga kerja. Kesuksesan Malaysia dalam membangun negaranya dikarenakan kekuatan dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terus dikembangkan secara aglomerasi dan menjadikan perkembangan negara Malaysia menjadi sangat pesat mulai tahun 1970 s.d 2014, menjadi kekuatan baru dalam perekonomian khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

3. Metode Penelitian

3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan Jurnal mengenai Konsep Pengembangan Ekonomi kerakyatan di Kota Medan menggunakan *Sumber Sekunder*. *Sumber Sekunder* adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui Data BPS dan buku literatur yang telah

terekomendasi oleh beberapa peneliti yang memiliki data terstruktur serta pengambilan data dari *website* hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan [8].

Dengan demikian melalui berbagai literatur dan *website* akan dibuat suatu rekomendasi yang tepat untuk nantinya para masyarakat dan pemerintah untuk dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam tatanan kewirausahaan dan dapat dijadikan suatu solusi sebagai implementasi nyata di lapangan.

3.2. Analisis Data

Analisis data yang akan diambil dengan menggunakan Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

Statistik deskriptif yang diambil merupakan suatu data yang disajikan untuk mengukur sejauh mana realitas yang terjadi di Kota Medan khususnya di dalam pemberdayaan masyarakat dari esensi ekonomi kerakyatan dan diupayakan melalui data yang disajikan akan menjadikan suatu peningkatan di masa yang akan datang untuk memberikan solusi terhadap pemerintah Kota Medan dalam mengambil suatu langkah kebijakan publik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan

Kota Medan yang merupakan barometer terhadap perkembangan Sumatera Utara dikarenakan sebagai kota yang melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat konsep mental and *emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberi sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab) ditetapkan dengan sinergis dari beberapa potensi Kota Medan yang sangat menyebar melalui lingkungan bisnis, kemitraan antara Pemerintah Kota, Swasta dan masyarakat, Peranan Institusional Bisnis (Kadin), Kebijakan terhadap Investasi Asing dan Dukungan Lembaga Keuangan. Keeratan dari berbagai elemen, mampu menciptakan suatu sinergis yang bermanfaat dalam perkembangan Kota Medan seperti yang selalu diinformasikan Medan *Brand Keren*.

Kota Medan memiliki beberapa potensi daerah yaitu [12]:

1. Lingkungan Bisnis
2. Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta, dan Masyarakat
3. Peran Institusional Bisnis (Kadin)
4. Kebijakan Terhadap Investasi Asing
5. Dukungan Lembaga Keuangan

Dengan keterlibatan sebagai partisipasi masyarakat diperlukan agar mampu untuk meminimalisir dari *black economy* yang terjadi pada Kota Medan dan bisa menggerakkan perekonomian Kota Medan dengan cara peningkatan dari perolehan sektor pajak serta dilakukan suatu kebijakan publik yang lebih segmented sesuai dengan potensi yang diraih Kota Medan.

4.2. Kebijakan Publik dalam Masyarakat di Kota Medan

Sebagai tuntutan kebijakan publik, menuntut beberapa seperti Tuntutan kebijakan (*policy demands*), Keputusan kebijakan (*policy decision*), Pernyataan kebijakan (*policy statement*), Keluaran kebijakan (*policy outputs*), Hasil Akhir Kebijakan (*policy outcomes*)

sebagai esensi dari kebijakan public. Penggerakan dari kebijakan publik ini dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan dapat menciptakan suatu kestabilan dalam pembangunan ekonomi di Kota Medan.

Pengeluaran pemerintah, merupakan belanja rutin negara meliputi: investasi pemerintah, konsumsi pemerintah dan pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang bersifat otonom untuk saat ini masih belum menghasilkan hal yang maksimal, dimana pusat pertumbuhan Industri Kota Medan menempati posisi kedua sebesar 18,20% yang kalah dari Deli Serdang sebesar 29,95%. Hal ini perlu dilakukan kebijakan yang lebih tepat lagi dalam hal pengeluaran pemerintah dalam makro ekonomi untuk meningkatkan basis insdustrialisasi sebagai dasar untuk meningkatkan peroleh Pembangunan Domestik Regional Bruto.

Sementara PDRB Kota Medan dari tahun 2010 s.d 2012 tetap mengalami kenaikan yang *significant* melalui Atas dasar harga konstan (Adhk). Tahun 2010 PDRB sebesar 35.822.220.000 naik menjadi 38. 576.230.000 pada tahun 2011 dan tahun 2012 tetap mengalami kenaikan 41.519.320.000. Kenaikan dari PDRB dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 2,754,010,000 dan kenaikan dari tahun 2011 ke 2012 sebesar 2,943,090,000.

Tetapi kenaikan yang terjadi masih bisa dikembangkan jika banyak terobosan pada sektor UMKM menjadi proses utama dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kota Medan. Dari 9 sektor yang membentuk PDRB Kota medan dapat terlihat dari setiap sektor yang membentuk dari 2010, 2011 dan 2012 terhadap perkembangan oleh sektor yang selalu sama. Dari Tahun 2010, dapat terlihat untuk pembentuk PDRB Kota Medan, 1. Sektor 6. Perdagangan, Hotel dan restaurant sebesar 26%, diikuti oleh 2. Sektor 7. Pengangkutan dan komunikasi sebesar 18% dan untuk 3. Yaitu Sektor 3. Industri pengolahan.

4.3. Peranan Kewirausahaan di Kota Medan

Dari segi kelembagaan, di Kota Medan, juga telah berdiri suatu lembaga bisnis independent yang mampu menarik pebisnis Kota medan untuk menjadi pengusaha yang tangguh. Kelembagaan ini berlokasi di jalan kapten muslim no. 75 Medan. Untuk Profile komunitas tangan di atas (TDA) bahwa Istilah Tangan Di Atas (tangan di atas lebih baik dari tangan dibawah) yang diperluas tafsirnya menjadi pengusaha yang gemar berbagi. 12 orang dari peserta talkshow itu langsung action belajar berdagang di ITC Mangga Dua. Komunikasi di antara para alumni talkshow melalui sebuah mailing list untuk saling berkoordinasi dan membahas permasalahan bisnis.Mailing list itu kemudian dibuka untuk umum dengan anggota sampai hari initelah mencapai 8000 orang seluruh Indonesia, sebagai media komunikasi paling awal dan utama Komunitas Bisnis Tangan Di Atas [13].

Sebelumnya, Komunitas Rumah Zakat, juga melakukan pelatihan untuk di Pulau Jawa yang mengetengahkan basis keuangan dimana Rumah Zakat cabang Cilegon menggelar pelatihan kewirausahaan untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dihadiri 16 Penerima Manfaat di Kantor Rumah Zakat cabang Cilegon, Jumat (23/3). Materi pelatihan kali ini tentang manajemen usaha kecil, pelayanan mutu konsumen dan penghitungan pencatatan keuangan. Selain itu para peserta juga diberikan materi tentang motivasi yang dipandu langsung oleh Micro Business Officer (MBO) yang menyampaikan materi perkembangan suatu usaha Penerima Manfaat [3].

Jika dikaitkan dengan aglomerasi, Aglomerasi vertikal, TDA menunjukkan industri-industri yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya di dalam proses produksi berkelanjutan, baik kaitan ke belakang maupun kaitan ke depan. Dengan adanya TDA mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk membina setiap anggota yang tergabung di dalamnya Selanjutnya aglomerasi horizontal menunjukkan industri-industri yang berkumpul, tidak memiliki kaitan dalam proses produksi, atau bersifat independen satu dengan lainnya.

Untuk aglomerasi vertikal ini, merupakan suatu bentukan kluster yang saling memfokuskan suatu dampak strategis dari wilayah namun konsentrasi tidak untuk saling menjatuhkan, bahkan memudahkan konsumen untuk memilih produk secara spesialisasi untuk menghasilkan produktifitas yang tinggi dan membuat kualitas laporan keuangan yang baik sebagai langkah mempersiapkan MEA.

Terkait dengan MEA, ada 4 pilar masyarakat ekonomi Asean adalah (1) Pasar tunggal dan basis produksi, (2) Kawasan ekonomi berdaya saing, (3) Pembangunan ekonomi yang merata, (4) Integrasi dengan ekonomi global [5]. Dengan demikian konsentrasi industri yang menjadi suatu basis produksi dan pasar tunggal, akan menyebabkan kawasan yang tergabung dalam MEA secara ekonomi dapat menghasilkan suatu tingkat biaya produksi yang lebih murah. Kawasan yang saling menjadi suatu keterkaitan yang erat, akan menciptakan suatu hasil yang lebih berdaya saing dikarenakan kerjasama yang dihasilkan akan meningkatkan suatu daya saing secara kompetitif. Dengan adanya persaingan yang sangat kompetitif diharapkan pembangunan ekonomi akan menjadi merata satu sama lain dan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja perekonomian bagi masyarakat di kawasan masyarakat ekonomi Asean sehingga ketika terjadinya integrasi dengan ekonomi global, dapat menjadikan produk yang dihasilkan akan lebih kompetitif

5. Kesimpulan dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Kota Medan yang merupakan barometer terhadap perkembangan Sumatera Utara dikarenakan sebagai kota yang melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat konsep mental and *emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberi sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab) ditetapkan dengan sinergis dari beberapa potensi Kota Medan yang sangat menyebar melalui lingkungan bisnis, kemitraan antara Pemerintah Kota, Swasta dan masyarakat, Peranan Institusional Bisnis (Kadin), Kebijakan terhadap Investasi Asing dan Dukungan Lembaga Keuangan. Dengan keterlibatan sebagai partisipasi masyarakat diperlukan agar mampu untuk meminimalisir dari *black economy* yang terjadi pada Kota Medan dan bisa menggerakkan perekonomian Kota Medan dengan cara peningkatan dari perolehan sektor pajak.

TDA sebagai kelembagaan menghasilkan produksi dalam kehidupan ekonomi dan menghasilkan utility (nilai) suatu benda serta menghasilkan amal/kerja, modal, tanah dalam waktu tertentu. Dalam sistem ekonomi islam, beberapa hal seperti visi dan misi TDA menerapkan nilai-nilai syariah. Dalam artian, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus dalam kerangka halal jika dihadapkan dengan industri kuliner. TDA turut berperan untuk memfasilitasi semua anggotanya dengan pemerintah dalam rangka memperkuat kebijakan publik seperti Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) Kota Medan, bahkan memberikan berbagai seminar dengan SMK se Kota Medan dalam rangka meningkatkan paham kewirausahaan

5.2. Saran

Pemerintah Kota Medan diarahkan untuk melakukan explore terhadap potensi Kota medan dengan suatu optimisme, edukasi terarah dan terus berkolaborasi dengan pengusaha Kota Medan dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan terintegrasi berbasis 4 pilar masyarakat Asean 2015 Asean yaitu Pasar Tunggal dan Basis Produksi, Kawasan Ekonomi yang berdaya saing, Pembangunan Ekonomi yang merata dan. Integrasi Ekonomi Global. Jika Kota Medan mampu secara efisien dan efektif memberdayakan semua potensi dan mengerahkan

partisipasi masyarakat, maka Medan akan menjadi kekuatan baru dalam industri di masa akan datang. Suatu optimisme yang perlu dilakukan dengan kerja nyata menuju Medan *Brand Keren*.

Referensi

- [1] Hamid, E. S., (2012). *Dinamika Ekonomi Indonesia*, UII Press Yogyakarta.
- [2] Hasanah, E. U., (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*, CAPS, Yogyakarta.
- [3] <http://www.rumahzakat.org>. (n.d.).
- [4] Huraerah, A., (2008). *Pengorganisasian & Pengembangan masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Pendidikan, Bandung.
- [5] Indonesia, M. K., (2015.). *Masyarakat Ekonomi Asean*, Jakarta.
- [6] Madani, M., (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [7] Marthon, S, S., (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, PT. Bestari Buana Murni, Jakarta.
- [8] Sugiyono., (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.
- [9] Sukirno, S., (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- [10] Susanto, H., (2011). *Under Ground Economy*, Baduose Media, Jakarta.
- [11] Teguh, M., (2010). *Ekonomi Industri*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [12] www.pemkomedan.go.id. (n.d.).
- [13] www.tangandiatas.com. (n.d.).